

Review Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Gurita

Fery Sutyan

Ketua Team Kerja Pengelolaan SDI Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan dan
Kelembagaan SDI WPPNRI Perairan Laut
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Pertemuan Konsultasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder Consultation)
Draft RPP Gurita
Makassar, 8 Agustus 2024

Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI



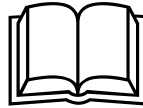
Pengelolaan SDI berbasis WPPNRI
Perpres 18/2020 RPJMN 2020-2024



Amanah Penyusunan RPP:

1. **UU Perikanan No. 31 Tahun 2004**
Pasal 7 ayat (1) huruf a. : Menteri menetapkan:
 - a. **Rencana Pengelolaan Perikanan;**
2. **PP No. 27 TAHUN 2021, Pasal 41**
 - a. Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan **Rencana Pengelolaan Perikanan.**

”**Dokumen Resmi** sebagai **ACUAN** bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan”



Dokumen RPP

Pedoman Penyusunan RPP:

- Permen KP No. 22 Tahun 2021**
- RPP ditetapkan berdasarkan **WPPNRI** dan/atau **jenis Ikan.** –
 - WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. WPPNRI di **Perairan Laut;** dan b. **WPPNRI PD.**

Lembaga Pengelola Perikanan

Implementasi RPP melalui LPP WPPNRI



Rencana Pengelolaan Perikanan

RPP adalah dokumen resmi yang memuat status Perikanan dan rencana strategis Pengelolaan Perikanan.



Harvest Strategy (HS) dan Harvest Control Rules (HCR)

Tindakan Pengelolaan secara detail dituangkan ke dalam Dokumen **Harvest Strategi** yang memuat **Harvest Control Rules (HCR)**



Tugas dan Fungsi LPP

Tugas LPP

(Pasal 28)

Melakukan **koordinasi pelaksanaan RPP** di WPPNRI dan **memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan** Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI

Fungsi LPP

(Pasal 29 ayat 1 dan 2)

1. Pengkoordinasian pelaksanaan RPP;
2. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP; dan
3. Pengkoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Perikanan berkelanjutan di WPPNRI
4. Penyusunan laporan

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)



RPP disusun berdasarkan pendekatan kewilayahan atau WPPNRI dan Jenis Ikan

Rencana Pengelolaan Perikanan berbasis WPPNRI

WPPNRI	No. Kepmen KP	Kelompok Jenis Ikan Prioritas yang dikelola				Status Dokumen
571	Kepmen KP No. 75/KEPMEN-KP/2016	udang	pelagis kecil	-		
572	Kepmen KP No. 76/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		
573	Kepmen KP No. 77/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
711	Kepmen KP No. 78/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		
712	Kepmen KP No. 79/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
713	Kepmen KP No. 80/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Reviu
714	Kepmen KP No. 81/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal		Proses Reviu
715	Kepmen KP No. 82/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	ikan karang	Proses Reviu
716	Kepmen KP No. 83/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	
717	Kepmen KP No. 84/KEPMEN-KP/2016	-	pelagis kecil	demersal	-	Proses Reviu
718	Kepmen KP No. 54/KEPMEN-KP/2014	udang	-	demersal		Proses Reviu

RPP BERBASIS JENIS IKAN



Jenis Ikan															
Ikan	No. KEPMEN KP	Lokasi WPPNRI											Status Dokumen	Jenis	
		571	572	573	711	712	713	714	715	716	717	718			
Rajungan	KEPMEN KP No. 83/KEPMEN - KP/2022				✓	✓	✓								
Lemuru	KEPMEN KP No. 198/KEPMEN - KP/2023			✓			✓								
Ikan Terbang	Kepmen KP No. 69/KEPMEN-KP/2016						✓		✓			✓	Proses Finalisasi		
Sidat	KEPMEN KP No. 118/KEPMEN - KP/2021													<i>Anguila bicolor</i> dan <i>Anguila marmorata</i>	
TCT	KEPMEN KP No. 121/KEPMEN - KP/2021		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
Kakap dan Kerapu	KEPMEN KP No. 123/KEPMEN - KP/2021		✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓			
Lobster	Proses Penyusunan												Draft		
Kepiting	Proses Penyusunan												Draft		
Gurita	Proses Penyusunan						✓	✓	✓				Konsultasi Publik		

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud:

Tujuan:

1.3 Ruang Lingkup dan Wilayah
Pengelolaan

Outline RPP (Permen KP No.22 Tahun 2021)

II. STATUS PERIKANAN

2.1 Sumber Daya Ikan :

- 2.1.1 Estimasi potensi sumber daya ikan;
- 2.1.2 Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan;
- 2.1.3 Tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;
- 2.1.4 Alokasi sumber daya ikan;

2.2 Lingkungan Sumber Daya Ikan

ekosistem perairan yang meliputi ekosistem pesisir, dan/atau ekosistem laut yang mendukung kelimpahan Sumber Daya Ikan.

2.3 Sosial-ekonomi Perikanan

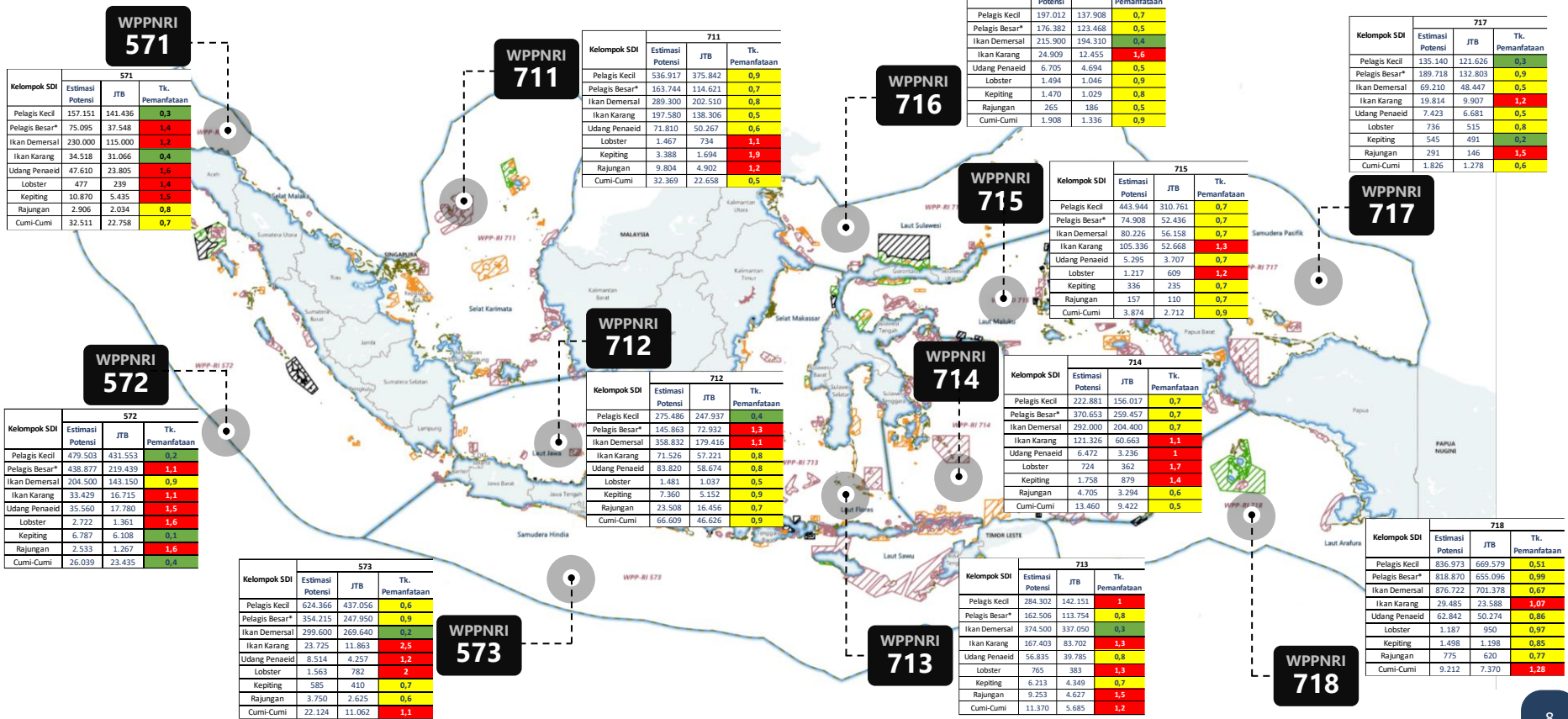
tingkat kesejahteraan nelayan, adat istiadat, Kearifan Lokal, konflik sosial, tingkat pendidikan, kepemilikan sarana penangkapan, dan ketersediaan prasarana penangkapan.

2.4 Tata Kelola Perikanan

aturan Pengelolaan Perikanan, kepatuhan terhadap aturan di bidang Perikanan, dan kelembagaan Pengelolaan Perikanan.

Kondisi Terkini Potensi Sumber Daya Ikan

(Kepmen KP No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi SDI, JTB dan Tingkat Pemanfaatan SDI)



WPPNRI		Pelagis Kecil	Pelagis Besar*	Ikan Demersal	Ikan Karang	Udang Penaeid	Lobster	Kepiting	Rajungan	Cumi-Cumi
571	Estimasi Potensi	157.151	75.095	230.000	34.518	47.610	477	10.870	2.906	32.511
	JTB	141.436	37.548	115.000	31.066	23.805	239	5.435	2.034	22.758
	Tk. Pemanfaatan	0,3	1,4	1,2	0,4	1,6	1,4	1,5	0,8	0,7
572	Estimasi Potensi	479.503	438.877	204.500	33.429	35.560	2.722	6.787	2.533	26.039
	JTB	431.553	219.439	143.150	16.715	17.780	1.361	6.108	1.267	23.435
	Tk. Pemanfaatan	0,2	1,1	0,9	1,1	1,5	1,6	0,1	1,6	0,4
573	Estimasi Potensi	624.366	354.215	299.600	23.725	8.514	1.563	585	3.750	22.124
	JTB	437.056	247.950	269.640	11.863	4.257	782	410	2.625	11.062
	Tk. Pemanfaatan	0,6	0,9	0,2	2,5	1,2	2,0	0,7	0,6	1,1
711	Estimasi Potensi	536.917	163.744	289.300	197.580	71.810	1.467	3.388	9.804	32.369
	JTB	375.842	114.621	202.510	138.306	50.267	734	1.694	4.902	22.658
	Tk. Pemanfaatan	0,9	0,7	0,8	0,5	0,6	1,1	1,9	1,2	0,5
712	Estimasi Potensi	275.486	145.863	358.832	71.526	83.820	1.481	7.360	23.508	66.609
	JTB	247.937	72.932	179.416	57.221	58.674	1.037	5.152	16.456	46.626
	Tk. Pemanfaatan	0,4	1,3	1,1	0,8	0,8	0,5	0,9	0,7	0,9
713	Estimasi Potensi	284.302	162.506	374.500	167.403	56.835	765	6.213	9.253	11.370
	JTB	142.151	113.754	337.050	83.702	39.785	383	4.349	4.627	5.685
	Tk. Pemanfaatan	1,0	0,8	0,3	1,3	0,8	1,3	0,7	1,5	1,2
714	Estimasi Potensi	222.881	370.653	292.000	121.326	6.472	724	1.758	4.705	13.460
	JTB	156.017	259.457	204.400	60.663	3.236	362	879	3.294	9.422
	Tk. Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,1	1,0	1,7	1,4	0,6	0,5
715	Estimasi Potensi	443.944	74.908	80.226	105.336	5.295	1.217	336	157	3.874
	JTB	310.761	52.436	56.158	52.668	3.707	609	235	110	2.712
	Tk. Pemanfaatan	0,7	0,7	0,7	1,3	0,7	1,2	0,7	0,7	0,9
716	Estimasi Potensi	197.012	176.382	215.900	24.909	6.705	1.494	1.470	265	1.908
	JTB	137.908	123.468	194.310	12.455	4.694	1.046	1.029	186	1.336
	Tk. Pemanfaatan	0,7	0,5	0,4	1,6	0,5	0,9	0,8	0,5	0,9
717	Estimasi Potensi	135.140	189.718	69.210	19.814	7.423	736	545	291	1.826
	JTB	121.626	132.803	48.447	9.907	6.681	515	491	146	1.278
	Tk. Pemanfaatan	0,3	0,9	0,5	1,2	0,5	0,8	0,2	1,5	0,6
718	Estimasi Potensi	836.973	818.870	876.722	29.485	62.842	1.187	1.498	775	9.212
	JTB	669.579	655.096	701.378	23.588	50.274	950	1.198	620	7.370
	Tk. Pemanfaatan	0,51	0,99	0,67	1,07	0,86	0,97	0,85	0,77	1,28

Angka Estimasi Potensi SDI, JTB, dan Tk. Pemanfaatan SDI di WPPNRI Berdasarkan Kepmen KP Nomor 19 Tahun 2022

*Ikan pelagis besar selain tuna dan cakalang

Bab 2.2 + 2.3 +2.4

- Data Jumlah Kapal Perikanan
- Data Jumlah Pelabuhan Perikanan
- Data Jumlah Kawasan Konservasi Perairan
- Data Nelayan dan Pendapatannya
- Data Oceanography
- Data Biologi Perairan
- Tata Kelola Perikanan

Outline RPP (Permen KP No.22 Tahun 2021)

III. RENCANA STRATEGIS PERIKANAN

3.1 Isu meliputi:

Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, sosial-ekonomi Perikanan dan tata kelola Perikanan.

3.2 Tujuan (masing-masing Isu)

3.3 Sasaran meliputi:

- indikator : merupakan variabel, penunjuk, atau indeks yang ditetapkan secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk mengukur kondisi saat ini dan mengukur keberhasilan sasaran.
- tolok ukur : merupakan standar dari sesuatu yang dapat diukur atau dinilai dan menjadi kondisi awal yang mendukung indikator.
- Untuk mencapai sasaran ditetapkan rencana aksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.4 Rencana Aksi Pengelolaan

- merupakan program dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan yang disepakati dan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
- ditunjuk penanggung jawab.
- Penanggung jawab merupakan unit kerja eselon I Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Instansi Terkait.
- Penanggung jawab bertanggung jawab atas pendanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan.

PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI WPPNRI

berdasarkan Kepmen KP Nomor 83 Tahun 2022



Contoh

Isu	
Sumber Daya Ikan	
1	Degradasi stok sumber daya rajungan di alam
Lingkungan Sumber Daya Ikan	
1	Terjadinya degradasi habitat penting rajungan
Sosial-Ekonomi Perikanan	
1	Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan rajungan (sesuai dengan jenis konflik yang ada)
2	Pendapatan nelayan rajungan masih rendah
Tata Kelola Perikanan	
1	Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan hukum
2	Belum efektifnya koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya rajungan

PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN DI WPPNRI 712

berdasarkan Perdirjen PT Nomor 6 Tahun 2020 tentang HS Perikanan Rajungan di WPPNRI 712



Unit Pengelolaan Perikanan

Rajungan di WPPNRI 712 merupakan satu populasi yang dikelola bersama

Tujuan Operasional

- Rasio potensi pemijahan dari rajungan meningkat menjadi 30% dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, pada titik acuan batas adalah 20%.
- Target presentase rajungan yang ditangkap diatas ukuran minimal tertangkap (minimum legal size) sesuai dengan aturan pemerintah (10 cm) dalam 5 tahun adalah 90 %

Reference Point

- LRP : 20%
- TRP : 30% (kesepakatan Berdasarkan pertimbangan karakteristik biologi, perilaku dan kepatuhan nelayan, dan kondisi ekosistem)

Tindakan Pengelolaan

- A. Pengendalian input
 - Registrasi atau pendaftaran kapal aktif penangkap rajungan;
 - Kepatuhan implementasi pengaturan jalur dan penempatan API di WPPNRI;
 - Pelaporan hasil tangkapan sesuai standar pelaporan yang telah disepakati (untuk monitoring).
- B. Pengendalian output
Pengendalian ukuran minimum penangkapan rajungan, yaitu 10 cm melalui kontrol dokumen dan pelarangan penangkapan rajungan bertelur;

Contoh

Nilai SPR Rajungan (Hasil kesepakatan) :

Lokasi	2016	2017	2018
Laut Jawa (WPPNRI 712)	0,30	0,19	0,21

IV. EVALUASI

- Evaluasi terhadap pelaksanaan RPP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- Evaluasi dikoordinasikan dalam **Lembaga Pengelola Perikanan di WPPNRI**.
- Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak evaluasi dilakukan.
- Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam Pengelolaan Perikanan.

Evaluasi Implementasi Rencana Pengelola Perikanan WPPNRI oleh Inspektorat II





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ijen@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR: B.3977.1/TJ.2/KP.440/VI/2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
b. bahwa untuk itu perlu mengukuhkan pegawai untuk melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada butir kesatu.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: 032.02.1.622098/2024, tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas

Kepada : Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Perikanan oleh Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta;
2. Segera menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal KKP Republik Indonesia.

Biaya : Biaya dibebankan kepada Anggaran DIPA Inspektorat Jenderal KKP TA 2024

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Jakarta, 07 Juni 2024

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur II,



Lutfi

Terbusan :

- Inspektur Jenderal
- Arsip



Uji Petik di LPP WPPNRI 573, 712, dan 715

Pencapaian Sasaran



No	WPPNRI	Jumlah Sasaran	Dicapai		Tidak Dicapai		Belum dapat Diukur	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	571	7	1	14,29%	2	28,57%	4	57,14%
2	572	8	3	37,50%	1	12,50%	4	50,00%
3	573	6	2	33,33%	4	66,67%	0	0%
4	711	6	2	33,33%	0	0%	4	66,67%
5	712	8	3	37,50%	0	0%	5	62,50%
6	713	9	2	22,22%	1	11,11%	6	66,67%
7	714	7	3	42,86%	0	0%	4	57,14%
8	715	10	2	20,00%	1	10,00%	7	70,00%
9	716	5	1	20,00%	2	40,00%	2	40,00%
10	717	5	1	20,00%	1	20,00%	3	60,00%
11	718	21	3	14,29%	0	0%	18	85,71%
Total		92	23	25,00%	12	13,14%	57	61,96%

Pelaksanaan Rencana Aksi



No	WPPNRI	Jumlah Rencana Aksi	Jumlah PJ	Dilaksanakan dilengkapi bukti dukung		Belum Dilaksanakan		Dilaksanakan namun tidak ada bukti dukung	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	571	33	165	8	4,85%	84	50,91%	73	44,24%
2	572	40	302	10	3,31%	95	31,46%	197	65,23%
3	573	30	270	32	11,85%	101	37,41%	137	50,74%
4	711	22	246	0	0%	130	52,85%	116	47,15%
5	712	32	256	54	21,09%	82	32,03%	120	46,88%
6	713	41	374	13	3,48%	250	66,84%	111	29,68%
7	714	29	213	6	2,82%	115	53,99%	92	43,19%
8	715	41	261	24	9,20%	165	63,22%	72	27,59%
9	716	26	190	29	15,26%	89	46,84%	72	37,89%
10	717	28	124	15	12,10%	80	64,52%	29	23,39%
11	718	56	101	9	8,91%	79	78,22%	13	12,87%
Total		378	2502	200	8,44%	1270	52,57%	1032	38,99%

Tindak Lanjut

- Penyelesaian Draft RPP Gurita (fokus ke Bab III dan Bab IV)
- Konsultasi Publik
- Finalisasi Draft RPP
- Legalisasi Draft RPP menjadi Keputusan Menteri
- Penyusunan *Harvest Strategy* (setelah RPP Gurita resmi menjadi Kepmen KP)

PERIKANAN MENUJU STANDAR KEBERLANJUTAN GLOBAL



Indonesia FIP

1. APRI's North Java Coast Blue Swimming Crab
2. PT Aruna Indonesia's East Kalimantan Blue Swimming Crab
3. WWF Indonesia Glass Eel FIP
4. WWF Indonesia/PT MAS Kupang Snapper Grouper
5. WWF Indonesia Takalar Seaweed Program
6. WWF Indonesia Wakatobi Snapper/Grouper
7. Blue Venture Sulawesi Octopus
8. PT Agrita Seafood's East Nusa Tenggara Octopus
9. TNC's National Level Snapper/Grouper
10. ADI's National Level Snapper/Grouper
11. CTC Banda Snapper Handline

12. PT Bali Seafood International's Large Pelagic
13. East Java Anchovy Short-Bodied Mackerel
14. PT Pahala Bahari Nusantara's Tuna Purse Seine
15. North Buru FairTrade
16. PT Citraraja Ampat Canning Skipjack
17. AP2HI's Indian Ocean Skipjack and Yellowfin Tuna Pole and Line
18. AP2HI's Indian Ocean Yellowfin Tuna Handline
19. AP2HI's WCPO Skipjack and Yellowfin Tuna Pole and Line
20. ATL's Indian Ocean Tuna Longline
21. ATL's WCPO Tuna Longline

ITM

22. PT Toba Surimi Industries's Medan Handline Squid
23. APRI Madura Blue Swimming Crab Trap
24. WWF Indonesia Hoat Sorbay Mudcrab Trap
25. DKP NTB and FIP2B's Saleh Bay Snapper/Grouper Longline and Handline
26. PT Sekar Laut Tbk Kotabaru Prawn Trammel Net
27. PT Cassanatama Nutrindo's White Legged Prawn Pots and Trammel Net

MSC Certified

28. AP2HI 1st Tranche North Sulawesi
29. AP2HI 1st Tranche North Maluku
30. AP2HI 1st Tranche West Flores
31. AP2HI 1st Tranche East Flores
32. AP2HI 1st Tranche Banda, Maluku





TERIMA KASIH

**Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
2024**